

---

# LINGKUNGAN KOTA LAYAK ANAK (*CHILD-FRIENDLY CITY*) BERDASARKAN PERSEPSI ORANGTUA DI KOTA YOGYAKARTA

Dodi Widiyanto dan R. Rijanta

Program Studi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM

\*email: dodi.widiyanto@ugm.ac.id; rijanta@ugm.ac.id

## Abstract

The research aims at identifying the concepts related to child-friendly city as perceived by parents in Yogyakarta municipality. A structured questionnaire is employed to collect the data on the ideal urban environment of a child-friendly city as perceived by the respondents. The respondents are withdrawn from four spots of locations in the city used as child playgrounds, i.e: Sultan Palace Yard, Taman Pintar (Smart Garden), Gembira Loka Zoo and Open Space under the flyover of Lempuyangan Station. Concepts related to child-friendly city are explored and grouped through a factor analysis. From the process of factor analysis, four measures of ideal urban environment related to child-friendly city can be identified. They are policy, protection, environment and planning for children. The first three concepts are well suited with the Indonesian national policy on child-friendly city. Whereas the last concept, planning for children, needs special attention as a part of the existing concept of policy, or it should be an independent concept that needs to be accommodated in planning norms, standards, procedures and manuals in an urban environment.

**Key words:** urban environment; child-friendly city; perception; urban planning; Yogyakarta

## 1. Pendahuluan

Awal perjalanan konsep *child-friendly city* (CFC) atau yang selanjutnya disebut Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dengan program *Growing Up City* (Lynch, 1977). Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuan dari program ini adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya.

Selanjutnya, konsep *child-friendly city* (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang mengaspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011).

Lebih lanjut, melalui konsep *child-friendly city* diharapkan pemerintah di suatu kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak anak seperti : kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, tidak menjadi korban diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang

luas, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi (Riggio, 2002 dan Child Friendly Cities, 2011).

Selanjutnya, gambaran mengenai konsep KLA dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 1) tergambar dari upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak, hal ini terlihat dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak (Karsten & van Vliet, 2006), 2) kemampuan akses anak terhadap lingkungan sekitarnya dalam hal pencapaian kota berkelanjutan dan kota ramah anak di Kota Christchurch, Selandia Baru (Tranter & Pawson, 2001), 3) penekanan arti penting bentuk kota (urban form) dan struktur sosial dan partisipasi anak di perkotaan di Kanada (Bridgman, 2004:338), 4) peranan dan penggunaan ruang terbuka sebagai arena bermain anak-anak Veitch, *et al.* (2007), 5) sementara itu, berdasarkan pengalaman dari negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Swedia, Kanada dan Lebanon dikatakan bahwa program kota layak anak lebih fokus kepada kebebasan anak dalam bergerak dan berekreasi (Riggio, 2002), 6)

pengalaman mengenai dampak pembangunan perkotaan terhadap pertumbuhan kesehatan dan kesejahteraan anak dapat diperoleh dari Australia (Woolcock *et al.*, 2010). Akhirnya dalam tulisannya, peneliti ini menyatakan bahwa diperlukan suatu penelitian komprehensif dari sudut pandang konseptual ataupun terapan dengan kemampuan menerangkan bagaimanakah sebenarnya pengaruh suatu bentuk kota (*urban form*) serta variasi sosial dan ekologi terhadap kesejahteraan anak.

Untuk mengetahui seperti apakah Kota Layak Anak dapat didekati dari indikator-indikator yang disusun. Oleh Riggio (2002) dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu kota layak anak bagi anak-anak muda adalah 1) mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kota tempat tinggalnya, 2) mengekspresikan pendapat, 3) berpartisipasi di dalam keluarga, komunitas dan kehidupan sosialnya, 4) memperoleh akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal, 5) memperoleh akses untuk meminum air yang sehat dan sanitasi yang memadai, 6) terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, 7) berjalan dengan aman di jalanan, 8) berjumpa teman dan bermain, 9) memiliki ruang hijau untuk tanaman dan hewan peliharaan, 10) tinggal di lingkungan yang sehat yang bebas polusi, 11) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, 12) didukung, dicintai dan memperoleh kasih sayang, 13) sama seperti warga lainnya dalam memperoleh akses terhadap setiap pelayanan tanpa memandang suku, agama, pendapatan, jenis kelamin dan keterbatasan (*disability*).

Arti penting dari penciptaan KLA adalah adanya ancaman obesitas (Tranter & Sharpe 2008 dalam Wilks 2010). Risiko lainnya yang kemungkinan muncul adalah kemunculan fenomena *fatter, sicker and sadder* seperti yang dikemukakan oleh Gleeson 2005 dalam Wilks 2010 hlm 28 dan kekhawatiran orangtua mengenai *stranger danger* (Valentine 1996 dalam Woolcock & Steele, 2008). Berangkat dari tiga hal tersebut, peranan dari penciptaan KLA sangatlah penting berdasarkan dari pengalaman Australia.

Di Indonesia, konsep *child-friendly city* diterjemahkan sebagai kota layak/ramah anak. Perkembangan dan pelaksanaan konsep ini dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya, berbagai program dan kegiatan dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian ini guna

mendukung terciptanya lingkungan Kota Layak Anak di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dan mengatasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Di Indonesia sendiri, konsep kota layak anak sudah terakomodasi dalam satu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam Peraturan Menteri tersebut diketahui bahwa terdapat indikator kota layak anak di Indonesia, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di atas merupakan indikator umum, sedangkan kebijakan mengenai Kota Layak Anak merupakan indikator khusus.

Secara khusus, alasan mengangkat tema KLA di Kota Yogyakarta adalah adanya informasi dari internet mengenai Kota Yogyakarta yang memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak. Selain itu, hasil rekap dari buku Isian Formulir Evaluasi Kota Layak Anak Kota Yogyakarta Tahun 2011 (KPMP,2011) menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta menerima penghargaan Kota Layak Anak dapat dilihat di berbagai media massa seperti Bernas, Republika, KR, Harian Jogja tanggal 24 Juli 2009. Berangkat dari hal ini, sangatlah penting untuk dilakukan suatu pengujian mengenai bagaimanakah pemahaman orangtua mengenai konsep kota layak anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang terkait dengan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta sebagaimana dipersiapkan oleh orang tua. Konsep-konsep yang berhubungan dengan Kota Layak Anak dieksplorasi berdasarkan analisis faktor terhadap seperangkat variabel yang dideduksi dari berbagai literatur yang relevan.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode perumusan konsep dengan cara melakukan penelaahan terhadap hasil studi empiris yang sudah dilaksanakan sebelumnya di dalam kajian KLA. Perumusan konsep dilakukan secara deduksi dengan cara mendasarkan kepada hasil studi empiris penelitian. Hasil studi empiris di dalam penelitian ini yaitu ditemukannya 20 faktor yang diperoleh dari *loading* variabel-variabel indikator KLA. Faktor-faktor tersebut diperoleh dengan cara melakukan uji analisis faktor terhadap 70 variabel dari total 89 variabel penelitian

dengan menggunakan software FACTOR (Lorenzo-Seva, 2006). Variabel-variabel masukan untuk analisis faktor tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan data secara terstruktur menggunakan kuesioner di lapangan dan responden dipilih menggunakan metode *accidental sampling* terhadap orang tua dari anak-anak yang sedang melakukan aktivitas bermain di empat lokasi terpilih di Kota Yogyakarta, yaitu 1) Taman Pintar Kota Yogyakarta, 2) Kebun Binatang GembiraLoka, 3) Alun-Alun Selatan Kota Yogyakarta, dan 4) Areal terbuka di bawah jalan layang Stasiun Keretaapi Lempuyangan.

### **3. Kota Layak Anak, Faktor-Faktor Pembentuk dan Konsep-Konsep Yang Relevan**

Hasil analisis faktor menunjukkan adanya dua puluh (20) faktor berkenaan dengan kota layak anak. Keduapuluh faktor hasil analisis faktor di dalam penelitian ini berturut-turut diberi nama i) faktor persetujuan orangtua terhadap kebijakan Kota Layak Anak, ii) faktor lalu lintas dan bermain di lingkungan sekitar, iii) faktor akta kelahiran, iv) faktor keamanan di sekolah, v) faktor kebersihan toilet sekolah, vi) faktor kebutuhan air dan kelayakan status tempat tinggal, vii) faktor kedisiplinan di sekolah, viii) faktor teman dewasa di lingkungan sekitar, ix) faktor teman, x) faktor sekolah, diskriminasi, pengawasan orangtua, dan hak anak, xi) faktor sampah, xii) faktor ketersediaan air di sekolah, xiii) faktor kekerasan, xiv) faktor perencanaan bagi anak, xv) faktor hak kesehatan dan memperoleh informasi bagi anak, xvi) faktor kepemilikan sambungan listrik di rumah, xvii) faktor udara, xviii) faktor bermain di dalam rumah, xix) faktor jajan, dan xx) faktor kebijakan kesehatan pendukung penciptaan kota layak anak.

Perumusan kedua puluh faktor tersebut di atas dikelompokkan lebih lanjut untuk menghasilkan tema-tema yang selanjutnya dikelompokkan menjadi konsep-konsep KLA berdasarkan persepsi orangtua di Kota Yogyakarta. Klasifikasi terhadap keduapuluh faktor di atas menghasilkan beberapa tema, yaitu 1) kebijakan pemerintah, 2) lalu-lintas, bermain, dan teman dewasa di lingkungan sekitar, 3) sekolah, 4) teman, 5) lingkungan, 6) hak anak, 7) tempat tinggal, 8) sekolah, diskriminasi, pengawasan orangtua dan hak anak, 9) perencanaan bagi anak, dan 10) jajanan di sekolah. Selanjutnya, dari kesepuluh tema tersebut dapat dikerucutkan ke dalam konsep-konsep KLA sebagai berikut: 1) kebijakan, 2) lalu-lintas, bermain dan teman, 3) sekolah, diskriminasi, kekerasan,

pengawasan orangtua dan hak anak, 4) lingkungan, 5) tempat tinggal, dan 6) perencanaan yang sensitif bagi kebutuhan anak.

Konsep kebijakan KLA di Kota Yogyakarta terlihat dari berbagai upaya aktif Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun beberapa peraturan pendukung terciptanya atmosfer KLA di Kota Yogyakarta. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain tergambar dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan berbagai kebijakan dalam bentuk lain. Peraturan-peraturan tersebut mendukung hak-hak anak dalam hal kependudukan, pendidikan, kesehatan, pembentukan Forum Anak Kota, selain itu juga telah memberikan sosialisasi mengenai program KLA sampai tingkat kecamatan, bahkan Pemerintah Kota juga telah bekerjasama dengan LSM dalam bentuk percontohan program Kampung Layak Anak. Konsep kebijakan ini secara normatif sejalan dengan indikator khusus di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009.

Lebih jauh, respon pemerintah melalui penyusunan kebijakan mengenai KLA menggambarkan kepedulian pemerintah terhadaparganya tanpa terkecuali, dalam hal ini adalah anak. Dukungan terhadap arti penting konsep kebijakan dapat dilihat di dalam tulisan Corsi, (2002) yang menyatakan bahwa bentuk perhatian pemerintah dapat berupa pembuatan rute aman dari rumah sampai ke sekolah bagi anak-anak, perluasan taman-taman bermain, dan pembuatan jalur sepeda. Sementara itu, hasil studi empiris dari Irmawati (2009) mengenai program-program penciptaan KLA di Kota Surakarta menunjukkan antara lain 1) Solo *Car Free Day*, 2) Puskesmas Ramah Anak, 3) Gerakan Wajib Jam Belajar, dan 4) Pendirian Taman Cerdas. Di lain tempat, hasil rekapitulasi selama penelitian diperoleh hasil antara lain program-program seperti 1) Forum Anak Kota, 2) Kartu Identitas Anak, 3) Rumah Pemulihan Gizi, 4) Sekolah Ramah Anak, 5) Program Sekolah Sehat, dan 6) Pembinaan Jajanan Sehat di sekolah sudah diterapkan dalam rangka mendukung penciptaan KLA di Kota Yogyakarta. Berbagai hasil kajian mengenai konsep kebijakan di atas menggambarkan bahwa kedudukan suatu kebijakan adalah vital dalam rangka mendukung penciptaan KLA. Apabila di dalam tulisan Corsi (2002) disebutkan adanya dua model pendukung kebijakan, yaitu 1) model dengan orientasi edukasi, kognisi dan normatif, serta 2) model promosi partisipasi sosial.

Maka, berdasarkan dua contoh lokasi penciptaan KLA di Indonesia, yaitu di Kota Surakarta dan Yogyakarta secara bersama-sama mengkonfirmasi dua model kebijakan dari Corsi tersebut.

Konsep kedua adalah keamanan lingkungan permainan yang mencakup *loading*: lalu-lintas, bermain dan teman. Studi empiris mengenai pendapat orangtua terhadap konsep lalu-lintas digali dari pendapat mereka dalam menilai tingkat keamanan lalu-lintas di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka (di tingkat Rukun Tetangga dan kampung) bagi putra dan/atau putri mereka. Selanjutnya, konsep bermain di dalam penelitian ini diwakili oleh pendapat orangtua mengenai tingkat rasa keamanan tatkala putra dan/atau putrinya bermain di lingkungan sekitar dan tingkat persetujuan bahwa sebagian besar putra dan/atau putrinya bermain di dalam rumah. Akhirnya, konsep teman diperoleh dari pandangan orangtua terhadap kepemilikan teman multietnis dan asal yang berbeda dan teman yang berperilaku baik dan sebaya di lingkungan sekitar mereka tinggal.

Kekhasan konsep keamanan lingkungan permainan dengan *loading* lalu-lintas, bermain dan teman di Kota Yogyakarta walaupun agak berbeda namun hampir sama dengan pendapat Tranter dan Sharpe (2007) dalam Wilks (2010) bahwa bahaya akan lalu lintas menyebabkan orangtua memberikan perhatian terhadap anak-anaknya seperti pengalaman di Australia. Sementara itu, kajian Tranter dan Pawson (2001) menyebutkan bahwa dunia anak adalah bermain, sehingga sangatlah penting bagi anak untuk memperoleh dunianya melalui perolehan akses untuk bermain. Penekanan Tranter dan Pawson (2001) berikutnya adalah arti penting keamanan bagi anak melalui perhatian terhadap lalu lintas dan polusi.

Konsep ketiga dalam penelitian ini digambarkan ke dalam sekolah, diskriminasi, kekerasan, pengawasan orangtua dan hak anak. Konsep ini tersusun dari *loading* seperti kepemilikan akta kelahiran, keamanan di sekolah, kebersihan toilet sekolah, kedisiplinan di sekolah; sekolah, diskriminasi, pengawasan orangtua, dan hak anak; ketersediaan air di sekolah; dan hak kesehatan dan memperoleh informasi bagi anak. Hal ini berkaitan dengan pengalaman di Australia mengenai kekhawatiran orangtua akan orang asing (Tranter dan Sharpe, 2007) dalam Wilks (2010), selain itu pemenuhan hak-hak dasar anak untuk memperoleh semua pelayanan dasar dan keamanan serta perlindungan dari usaha-usaha eksploitasi juga

menjadi perhatian dalam studi tersebut. Sementara itu, pengalaman di Kota Christchurch, Selandia Baru menunjukkan bahwa orangtua memberikan tingkat kebebasan terhadap anak-anaknya tatkala berangkat sekolah, bermain, menyeberang jalan, ataupun bermain di jalanan (Tranter & Pawson, 2001). Pemenuhan hak-hak dasar anak adalah hal mutlak dalam penciptaan KLA. Selain itu, aspek perlindungan menjadi perhatian baik itu pengalaman di berbagai Negara ataupun di Kota Yogyakarta sendiri bahwa orangtua memberikan perhatian kepada anaknya melalui pengawasan dan perlindungan. Parameter perbedaan usia seiring dengan bertambahnya usia anak menjadi dasar tingkat pemberian pengawasan terhadap anak seperti diutarakan oleh Tranter dan Pawson (2001) oleh orangtua. Namun, hasil uji empiris di Kota Yogyakarta berbeda dengan pandangan Wilks (2010), Leonard 2007 dalam Woolcock & Steele (2008) yaitu belum mengarahnya perhatian orangtua sampai dengan melakukan proteksi yang berlebihan terhadap anak yang pada gilirannya nanti justru berdampak kurang baik bagi anak yaitu kebebasan bergerak anak. Selanjutnya, kajian terhadap aspek normatif menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 menunjukkan bahwa konsep kedua dan ketiga dalam penelitian ini termasuk ke dalam indikator perlindungan.

Konsep keempat adalah lingkungan. Pembahasan mengenai lingkungan disumbang oleh sampah dan udara. Udara bersih di lingkungan sekitar diperlukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Arti penting konsep ini diutarakan oleh Riggio (2002) dan KLA (2011) bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bebas dari polusi dan berbagai pemenuhan hak dasar. Selain itu, fungsi lingkungan bagi anak seperti sudah dikemukakan di atas berkaitan erat dengan perkembangan anak. Fenomena anak-anak dengan sindrom *fatter, sicker, and sadder* seperti dikemukakan oleh Gleeson (2005) dalam Wilks (2010) di Australia belum dapat diidentifikasi untuk studi kasus di Kota Yogyakarta. Konsep kelima adalah tempat tinggal. Konsep ini didukung oleh faktor-faktor kebutuhan air dan kelayakan tempat tinggal; dan ketersediaan sambungan listrik. Kedua faktor ini merupakan pemenuhan hak dasar anak atas tempat tinggal yang layak. Konsep kelima ini sejalan dengan definisi KLA menurut Wilks (2010) yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan dasar salah satunya adalah

tempat tinggal. Hal demikian dapat dilihat berdasarkan persepsi orangtua terhadap beberapa kondisi berikut: 1) ketersediaan air minum di rumah; 2) ketersediaan air untuk toilet di rumah; 3) ketersediaan air untuk mandi atau memandikan; 4) kelayakan tempat tinggal dan tidak akan mengalami pengrusakan setiap saat (status tempat tinggal); 5) kepemilikan sambungan listrik di dalam rumah responden; 6) kecukupan ruang di rumah untuk bermain bagi putra dan/atau putri responden.

Konsep keenam atau yang terakhir adalah perencanaan bagi anak. Konsep ini disumbang oleh faktor perencanaan bagi anak. Faktor ini sebelumnya didukung oleh variabel-variabel perencanaan di lingkungan sekitar di mana anak tinggal dan merujuk kepada partisipasi orangtua dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan anak di lingkungan sekitar. Konsep ini sejalan dan perlu dilaksanakan karena pengalaman dari Cunningham *et al.* (2003) di Kota Blue Mountains, New South Wales, Australia juga memberikan gambaran arti penting perencanaan pro anak dalam bentuk pelibatan anak dalam memprediksi masa depan kotanya. Kajian peneliti tersebut menghasilkan tiga hal perhatian anak di masa mendatang, yaitu kendaraan dalam hal ini adalah transportasi dan mobilitas individu; dampak pembangunan kota; dan ketersediaan tempat bermain. Melalui pelibatan proses perencanaan kota yang pro anak diharapkan suatu desain ataupun rancangan perencanaan kota nantinya juga berpihak kepada anak. Pengalaman di Kota Yogyakarta menunjukkan sudah dijumpai suatu fasilitas pendukung kegiatan anak seperti adanya Zona Aman dan Selamat Sekolah.

Dari keenam konsep tersebut apabila dikerucutkan lagi akan tersusun empat konsep utama, yaitu kebijakan pemerintah, perlindungan, lingkungan dan perencanaan bagi anak. Apabila dikaitkan secara normatif dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tiga konsep baru tersebut termasuk di dalam

indikator umum dan khusus. Sementara itu, konsep perencanaan bagi anak dapat berdiri sendiri ataupun dapat dimasukkan ke dalam indikator kebijakan pemerintah. Meskipun demikian penelitian ini masih menyisakan agenda untuk penelitian lebih lanjut tentang relasi antar berbagai konsep tersebut untuk membentuk teori tentang kota layak anak di Indonesia.

#### **4. Simpulan**

Kajian secara normatif, empiris, dan teoritis menunjukkan bahwa pada akhirnya terdapat empat konsep utama di dalam penelitian ini, yaitu konsep kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan bagi anak. Keempat konsep tersebut tampaknya juga sudah diakomodasi dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia, kecuali konsep perencanaan untuk anak yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam kebijakan. Konsep perencanaan bagi anak perlu dikaji lebih lanjut untuk diintegrasikan dalam kebijakan yang ada secara eksklusif atau dioperasionalkan sebagai bagian dari konsep kebijakan pemerintah. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi relasi antar keenam konsep yang ditemukan pada akhir penelitian ini dalam rangka memperoleh teori tentang kota layak anak berdasarkan kondisi lokal di Indonesia.

#### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Universitas Gadjah Mada melalui LPPM UGM yang telah mendanai penelitian ini melalui hibah penelitian dosen muda tahun anggaran 2011, dengan Kontrak Nomor: LPPM-UGM/1508/BID.I/2011, tanggal 4 Juli 2011. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Aris Munandar dan Venny Tri Kustanti, mahasiswa Program Studi Pembangunan Wilayah yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

**Daftar Pustaka**

- Bridgman, R. 2004. "Criteria for Best Practices in Building Child-Friendly Cities: Involving Young People in Urban Planning and Design", *Canadian Journal of Urban Research* 13 (2), 337- 346.
- Child Friendly Cities. 2011. The CFC Initiative. <http://www.childfriendlycities.org/en/overview/the-cfc-initiative>. diakses tanggal 12 Maret 2011.
- Child Friendly Cities. 2011. What is a Child Friendly City?. <http://www.childfriendlycities.org/en/overview/what-is-a-child-friendly-city>. diakses tanggal 12 Maret 2011.
- Corsi, M. 2002. "The Child Friendly City Initiative in Italy". *Environment and Urbanization* 14(2). 169-179.
- Irmawati, N. 2009. *Responsivitas Pemerintah Kota Surakarta terhadap Perlindungan Anak Menuju Solo Kota Layak Anak (KLA)*. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. <http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/173712312201007561.pdf>. diakses tanggal 10 Maret 2011.
- Karsten, L & van Vliet, W. 2006. "Children in the City: Reclaiming the Street". *Children, Youth and Environments*. 16(1). 151-167.
- KPMP. 2011. *Isian Formulir Evaluasi Kota Layak Anak Kota Yogyakarta*. KPMP. Yogyakarta.
- Lorenzo-Seva, Urbano, 2006. "FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model". *Behavioral Research Methods*. 38(1). 88-91.
- Lynch, K (Editor). 1977. *Growing up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca dan Warsawa*, The MIT Press dan UNESCO, Cambridge.
- Riggio, E. 2002. "Child friendly cities: good governance in the best interest of the child". *Environment and Urbanization* 14(2). 45-58.
- Tranter, P., & Pawson, E. 2001. "Children Access to Local Environments: a case- study of Christchurch, New Zealand". *Local Environment* 6(1). 27-48.
- Veitch, J., Salmon, J., & Ball, K. 2007. "Children's Perception of the Use of Public Open Spaces for Active Free-play". *Children's Geographies* 5(4). 409-422.
- Wilks, Judith. 2010. "Child-Friendly Cities: a place for active citizenship in geographical and environmental education". *International Research in Geographical and Environmental Education*, 19(1). 25-38.
- Woolcock, G & Steele, Wendy. 2008. *Child-Friendly Community Indicators- A Literature Review. Based on a Report Prepared by Urban Research Program for the NSW Commision for Children & Young People*. Griffith University. Nathan.
- Woolcock, G, Gleeson, B., & Randolph, B. 2010. "Urban Research and Child-Friendly Cities: a New Australian Outline". *Children's Geographies*, 8(2). 177-192.